

PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA PERHIMPUNAN MAHASIWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (PMKRI) CABANG KOTA SAMARINDA PADA PEMILU 2024

Ahmad Yani¹, Trisna Waty Riza Eryani^{2*}, Gregorius Agung Salmon³, Muhammad Wendy⁴
^{1,2,3,4}Administrasi Publik, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Kalimantan Timur

*Corresponding author's email: trisna@uwgm.ac.id

Article Info

Article History:

Received August 19, 2025

Revised August 30, 2025

Accepted August 31, 2025

Keywords:

general election,
political education,
first-time voters,
PMKRI organization,
Samarinda city

Copyright © 2025, The Author(s).
This is an open access article
under the CC-BY-SA license



ABSTRAK

Masyarakat Indonesia akan melangsungkan Pemilihan Umum (PEMILU) pada tahun 2024 yang merupakan suatu agenda rutin yang dilaksanakan tiap lima tahun. Pesta Demokrasi yang berkualitas dalam hal ini Pemilu akan dapat melahirkan pemimpin bangsa baru. Dari pemimpin bangsa yang berkualitas akan dapat menghasilkan strategi dan kebijakan yang baik, pencapaian kemajuan yang lebih berkualitas, khususnya dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemilih pemula adalah mereka yang belum bisa menyalurkan hak suara di Pemilu lima tahun sebelumnya, yakni Pemilu Serentak tahun 2019 lalu, sehingga belum bisa menggunakan hak pilihnya karena belum terkategori sebagai pemilih. Pengabdian masyarakat ini bertemakan tentang Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Persatuan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kota Samarinda Pada Pemilu 2024. Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman kepada peserta pemilih pemula yang tergabung dalam organisasi Perhimpunan Mahasiswa kota Samarinda agar berpartisipasi aktif dalam proses pelaksanaan pemilu serta memanfaatkan hak suaranya dengan baik. Berdasarkan hasil pengabdian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat skema terintegrasi ini mampu meningkatkan pemahaman pemilih pemula tentang pemilu, pendidikan politik, serta mau berpartisipasi politik, sehingga bisa menyalurkan aspirasi sesuai dengan hati nurani.

ABSTRACT

The Indonesian people will hold a General Election (PEMILU) in 2024, which is a routine agenda held every five years. A quality Democratic Party, in this case the Election, will be able to give birth to new national leaders. From quality national leaders, they will be able to produce good strategies and policies, achieving better quality progress, especially in improving people's welfare. First-time voters are those who have not been able to exercise their voting rights in the previous five-year Election, namely the 2019 Simultaneous Election, so they cannot exercise their voting rights because they are not yet categorized as voters. This community service theme is Political Education for First-time Voters of the Indonesian Christian Student Association (PMKRI) Samarinda City Branch in the 2024 Election. The purpose of this service is to provide understanding to first-time voter participants who are members of the Samarinda City Student Association organization to actively participate in the election process and utilize their voting rights properly. Based on the results of the service, it can be concluded that this integrated scheme community service activity is able to increase the understanding of first-time voters about elections, political education, and willingness to participate in politics, so they can channel their aspirations according to their conscience.

How to cite: Yani, A., Eryani, T. W. R., Salmon, G. A., & Wendy, M. (2025). PENDIDIKAN POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA PERHIMPUNAN MAHASIWA KATOLIK REPUBLIK INDONESIA (PMKRI) CABANG KOTA SAMARINDA PADA PEMILU 2024. *Devote : Jurnal Pengabdian Masyarakat Global*, 4(3), 258–264. <https://doi.org/10.55681/devote.v4i3.4489>

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan elemen penting dalam mewujudkan negara demokrasi sekaligus menjadi sarana kedaulatan rakyat untuk membentuk pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem demokrasi, Pemilu erat kaitannya dengan nilai-nilai seperti persamaan hak untuk memilih dan dipilih, pergantian kepemimpinan secara berkala, serta kebebasan berpendapat dan menentukan pilihan. Di

Indonesia, Pemilu menjadi bentuk konkret penerapan demokrasi yang memberi kesempatan bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi langsung dalam memilih pejabat publik. Hal ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemilu juga menjadi momen pesta demokrasi bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politik mereka dalam menentukan pemimpin yang dianggap layak menerima amanah jabatan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 1 poin 1 Tentang Pemilihan Umum, dapat dijelaskan bahwa pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah yang dihasilkan dari pemilu diharapkan menjadi pemerintah yang mendapatkan legitimasi yang kuat dan amanah. Pemilu pun menjadi tolak ukur dalam negara demokrasi, dimana rakyat secara langsung terlibat aktif dalam menentukan arah dan kebijakan politik negara untuk suatu periode kedepan. Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Negara-negara yang menganut sistem/paham demokrasi, lebih mudah mengukur partisipasi politik masyarakat ketika pemilihan umum diadakan. Intensitas keterlibatan warga dapat diukur dengan membandingkan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya (vote turnout) dengan jumlah total warga negara yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilihnya. Di negara-negara dengan sistem demokrasi yang stabil dan tidak mengalami fluktuasi, jika angka golput meningkat maka demokrasi tidak berjalan dengan baik.

Permasalahan yang teridentifikasi adalah bahwa pemilih pemula merupakan kelompok warga negara yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya pada pemilu. Tujuan kegiatan pengabdian ini untuk memberikan pemahaman kepada para pemilih pemula yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Samarinda mengenai Pemilihan Umum (Pemilu). Mengingat Pemilu 2024 akan menjadi pengalaman pertama mereka dalam memberikan suara, sehingga penting untuk memberikan sosialisasi pendidikan politik yang mencakup pengetahuan tentang proses pemilu, peran partai politik, dan prinsip demokrasi. Peningkatan pemahaman ini diharapkan membuat pemilih pemula PMKRI menyadari betapa pentingnya pemilu bagi keberlangsungan demokrasi dan kehidupan berbangsa serta bernegara, sehingga mereka memahami nilai strategis suara yang mereka berikan.

Pemilihan Umum atau yang sering disingkat sebagai pemilu merupakan suatu proses demokratis di mana warga negara secara langsung memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan. Dalam sistem demokrasi modern, pemilu menjadi salah satu mekanisme utama yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan ruang bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi melalui suara yang mereka berikan. Warga yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memilih kandidat atau partai politik yang mereka anggap paling mampu mewakili suara atau kepentingan mereka. Hasil pemilu kemudian menjadi dasar penentuan siapa yang akan menduduki jabatan politik tersebut, baik di tingkat lokal, daerah, maupun skala nasional. Selain itu, pemilu juga dimaksudkan untuk membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat, menjaga nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih benar-benar akan memperjuangkan aspirasi publik. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat sejumlah prinsip yang harus dipegang dalam penyelenggaraan pemilu, yaitu mandiri, proporsional, jujur, profesional, adil, akuntabel, berkepastian hukum, efektif, tertib, efisien, dan terbuka. Prinsip mandiri berarti pemilu dilaksanakan secara independen oleh penyelenggara seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) guna menjaga netralitas. Proporsional berarti proses pemilu harus mampu mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat secara seimbang. Prinsip jujur menuntut agar

seluruh tahapan pemilu bebas dari kecurangan atau manipulasi. Profesionalitas menuntut penyelenggara untuk menjalankan tugas sesuai kode etik dan standar kerja. Keadilan menuntut agar semua peserta mendapatkan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi. Akuntabilitas mengharuskan penyelenggara bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan mereka. Berkepastian hukum berarti pelaksanaan pemilu harus didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan dipahami semua pihak. Efektivitas menekankan pada pencapaian tujuan pemilu, termasuk partisipasi dan keamanan. Ketertiban mengacu pada proses yang berjalan aman dan tertib, sementara efisiensi menuntut penggunaan sumber daya secara optimal. Terakhir, prinsip keterbukaan menekankan pentingnya transparansi dalam setiap proses pemilu agar partai politik, calon, dan pemilih mendapatkan informasi yang mereka butuhkan.

Dalam perkembangan dunia saat ini, generasi muda, khususnya pemilih pemula, diharapkan mampu memahami dinamika politik yang tengah berlangsung di Indonesia. Mereka perlu memiliki landasan yang kuat yang sejalan dengan karakter dan jati diri bangsa, agar mampu menyaring berbagai pemikiran, ideologi baru, maupun tantangan dan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. Pemilih pemula yang memiliki kesadaran politik adalah mereka yang paham akan hak dan kewajiban serta bersedia berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam setiap proses pembangunan. Oleh karena itu, pendidikan politik memegang peranan penting dalam membentuk generasi muda yang kelak menjadi penerus bangsa. Firmansyah dan Kariyani (2021) menjelaskan bahwa pendidikan politik berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan konsep-konsep politik dengan tujuan akhir membuat pemilih pemula lebih melek politik.

Kelompok pemilih pemula biasanya berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, atau warga yang baru genap berusia 17 hingga sekitar 21 tahun. Secara jumlah, mereka menjadi salah satu segmen yang patut diperhitungkan karena populasinya besar dan sering memunculkan hasil yang tidak terduga. Mereka cenderung antusias, terbuka terhadap ide-ide baru, ingin melihat perubahan, dan belum terlalu terpengaruh oleh kepentingan politik yang bersifat praktis. Partisipasi mereka dalam pemilu sangat bergantung pada tingkat kesadaran politik, yaitu pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara serta keterkaitannya dengan kehidupan sosial. Berbeda dengan pemilih yang lebih berpengalaman, pemilih pemula masih minim bekal dalam menghadapi proses politik. Akibatnya, keputusan mereka sering kali belum mantap dan mudah berubah mengikuti informasi, situasi, atau pendapat orang-orang di sekitar. Dengan karakter seperti ini, pemilih pemula kerap masuk dalam kategori swing voters, yakni kelompok yang pilihannya belum pasti. Orientasi politik mereka belum terbentuk secara mendalam dan lebih dipengaruhi oleh dinamika lingkungan terdekat, baik keluarga, teman sebaya, maupun masyarakat sekitar. Media juga berperan penting dalam membentuk persepsi politik mereka, mulai dari pemberitaan televisi, materi kampanye cetak seperti brosur dan poster, hingga pesan-pesan yang beredar di ruang publik. Bagi remaja yang baru pertama kali menggunakan hak pilih, gaya hidup yang santai dan keinginan untuk mencari hal-hal yang menyenangkan sering menjadi ciri menonjol. Mereka cenderung menghindari hal-hal yang dirasa membosankan atau terlalu formal. Selain itu, kelompok pertemanan memiliki pengaruh kuat karena di usia ini kebutuhan untuk merasa diterima dalam lingkaran sosial sangat tinggi. Hasil survei menunjukkan bahwa generasi muda, termasuk generasi milenial dan generasi Z, akan menjadi basis pemilih terbesar dalam Pemilu 2024. Rentang usia pemilih muda ini mencakup 17 hingga 37 tahun, dan jumlahnya diperkirakan terus meningkat. Pada Pemilu Serentak 2019, data KPU RI mencatat bahwa sekitar 70 hingga 80 juta dari total 193 juta pemilih berasal dari kelompok ini. Artinya, hampir 40 persen suara berada di tangan pemilih muda, menjadikan mereka kekuatan penting dalam menentukan arah politik nasional.

Perhimpunan Mahasiswa Kristen Republik Indonesia (PMKRI) adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang bersifat nasional, intra-kampus, dan keagamaan (Kristen Katolik), yang memiliki misi untuk membina dan mengembangkan mahasiswa Katolik agar menjadi pribadi yang beriman, berpikir kritis, dan berjiwa nasionalis. PMKRI Cabang Samarinda awalnya berstatus sebagai calon cabang. Masa orientasi sebagai calon cabang berlangsung pada tanggal 24 hingga 28 Februari 1994. Kemudian, pada 23 November 1994, statusnya resmi disahkan menjadi cabang penuh dalam Sidang MPA-XVIII di Medan melalui TAP

MPA No. 03/TAP/MPA-XVIII/1994. PMKRI aktif dalam berbagai isu seperti keadilan sosial dan hak asasi manusia, dialog antaragama, pendidikan politik mahasiswa, serta pembangunan bangsa dan negara. PMKRI sering mengambil posisi kritis terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kehidupan demokrasi. Pada 7 November 2024, PMKRI Cabang Samarinda menggelar aksi di depan Balai Kota Samarinda sebagai bentuk pendampingan terhadap para pekerja proyek Teras Samarinda yang belum menerima hak upah dari perusahaan pemenang tender. Aksi ini kemudian diikuti dengan audiensi bersama Pemerintah Kota Samarinda guna memperjuangkan hak-hak para pekerja tersebut.

METODE PELAKSANAAN

Metode dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan melalui:

1. Perkenalan dan selayang pandang mengenai pematari dan FISIP UWGM.
2. Penyampaian materi mengenai pendidikan politik bagi pemilih pemula dalam pemilu untuk anggota organisasi PMKRI
3. Eksperimen pelaksanaan pemilu
4. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada tanggal 28 Januari 2024

Penentuan peserta dalam kegiatan pengabdian ini adalah mahasiswa yang ikut bergabung dalam kegiatan organisasi PMKRI Cabang Kota Samarinda, terutama yang belum pernah terlibat dalam Pemilihan Umum. Ada 15 mahasiswa yang menjadi peserta dalam kegiatan pengabdian ini. Dengan penerapan metode tersebut, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, salah satunya melalui terbangunnya hubungan yang harmonis antara kalangan akademisi dan anggota PMKRI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum atau yang biasa dikenal dengan sebutan Pemilu ini dimaksudkan untuk membangun sistem pemerintahan yang berlandaskan pada kehendak rakyat, menjaga nilai-nilai demokrasi, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta memastikan bahwa para pemimpin yang terpilih benar-benar akan memperjuangkan aspirasi publik. Agar demokrasi di dalam kegiatan ini tetap terjaga, pemilu dapat dilaksanakan secara adil, bebas dan transparan. Adapun berikut adalah fungsi-fungsi dari kegiatan pemilu, diantaranya:

1. Menjalinkan kedaulatan rakyat dengan memberi kesempatan kepada warga negara untuk secara langsung memilih wakil mereka di pemerintahan
2. Membentuk pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat karena dipilih secara demokratis oleh rakyat.
3. Menentukan perwakilan rakyat di lembaga legislatif melalui proses pemilihan yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat.
4. Memperkuat demokrasi dengan membuka ruang bagi rakyat untuk ikut memilih pemimpin dan menentukan arah kebijakan negara.
5. Mendorong partisipasi politik masyarakat dengan melibatkan mereka dalam proses pemilihan sekaligus meningkatkan kesadaran politik.
6. Menjadi sarana pergantian kekuasaan secara damai melalui mekanisme yang terorganisir sehingga pergantian pemerintahan bisa terjadi tanpa konflik atau kekerasan.

Kelompok pemilih pemula biasanya berasal dari kalangan pelajar, mahasiswa, atau warga yang baru genap berusia 17 hingga sekitar 21 tahun. Secara jumlah, mereka menjadi salah satu segmen yang patut diperhitungkan karena populasinya besar dan sering memunculkan hasil yang tidak terduga. Mereka cenderung antusias, terbuka terhadap ide-ide baru, ingin melihat perubahan, dan belum terlalu terpengaruh oleh kepentingan politik yang bersifat praktis. Partisipasi mereka dalam pemilu sangat bergantung pada tingkat kesadaran politik, yaitu pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara serta keterkaitannya dengan kehidupan sosial.

Dalam sebuah negara demokrasi, tingkat partisipasi politik menjadi salah satu tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana kedaulatan rakyat benar-benar dijalankan. Partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya memahami, tetapi juga aktif terlibat dalam urusan kenegaraan. Sebaliknya, partisipasi yang rendah sering kali menandakan kurangnya perhatian atau kepedulian publik terhadap persoalan pemerintahan. Fenomena seperti golongan putih (golput) pada pemilu merupakan salah satu cerminan rendahnya keterlibatan tersebut.

Demokrasi dipandang sebagai sistem pemerintahan yang paling sesuai dengan prinsip kebangsaan, karena selaras dengan sifat alami manusia yang ingin menentukan arah kehidupannya sendiri. Dalam sistem ini, warga negara diberi ruang untuk terlibat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih, dalam proses perumusan, pengembangan, hingga penetapan kebijakan dan peraturan. Demokrasi juga mensyaratkan adanya lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang mendukung, sehingga kebebasan politik dapat dijalankan secara adil dan setara bagi semua pihak.

Pendidikan politik memegang peranan penting dalam meningkatkan pemahaman serta kualitas para pemilih, khususnya saat menentukan pilihan pada pemilu. Bagi pemilih pemula, pendidikan politik menjadi acuan untuk menilai dan memilih calon wakil rakyat yang sesuai dengan aspirasi mereka. Melalui proses sosialisasi, pendidikan politik juga berfungsi membekali pemilih muda dengan wawasan yang cukup, sehingga mereka tidak mudah terbawa arus mobilisasi kepentingan partai politik yang sifatnya subjektif dan hanya menguntungkan pihak tertentu, termasuk kandidat tertentu (Firmansyah & Kariyani, 2021).

Adapun salah satu cara untuk menjalankan pendidikan politik ini adalah dengan melalui literasi politik. Literasi politik dapat diartikan sebagai upaya dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai persoalan politik kepada masyarakat, sehingga mereka mampu mengikuti dan terlibat dalam kegiatan politik.

Katarudin dan Putri (2020), literasi politik juga mencakup kemampuan memaknai serta menginterpretasikan berbagai konsep politik dan isu-isu yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan politik tidak hanya membekali calon pemimpin masa depan dengan pengetahuan tentang tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara, tetapi juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika pendidikan politik diterapkan sejak bangku sekolah, hal ini dapat menumbuhkan kesadaran politik pada pemilih pemula, mendorong perubahan sikap, dan meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam pemilu, termasuk Pemilu 2024.

Selain itu, pemahaman yang baik mengenai proses pemilu juga dapat membantu mencegah terjadinya konflik atau kekerasan, baik sebelum maupun sesudah pemungutan suara. Dalam pendidikan politik, pemilih memperoleh informasi penting seperti tata cara memberikan suara, penjelasan mengenai calon yang bertanding, serta pemahaman tentang bentuk dan isi surat suara (Setyawaty, 2014). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan pendidikan politik ini bertujuan memberikan informasi, pengetahuan, dan pemahaman kepada pemilih pemula agar mereka terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu 2024. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Tahap Perencanaan.

Pada tahap ini, tim terlebih dahulu menetapkan tema kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu dilakukan analisis terhadap permasalahan yang ada, menentukan metode yang dianggap paling tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan memilih program kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dimulai dengan pengurusan administrasi dan perizinan, diikuti koordinasi bersama PMKRI untuk menyepakati jadwal dan teknis kegiatan. Peserta yang sesuai dengan kriteria sasaran kemudian diundang. Selain itu, tim menyusun instrumen berupa daftar pertanyaan yang bertujuan mengukur sejauh mana materi dapat diserap oleh peserta. Instrumen ini diberikan dua kali, yaitu sebelum kegiatan dimulai (pretest) dan setelah materi selesai disampaikan (posttest).

3. Tahap Evaluasi

Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dan posttest yang diisi oleh peserta melalui kuesioner. Apabila terdapat peningkatan skor pemahaman, maka kegiatan dianggap berhasil mencapai tujuan. Metode ini memastikan bahwa keberhasilan kegiatan dapat diukur secara objektif.

Adapun setelah dilakukan Pendidikan politik, berhasil mencapai beberapa hasil positif:

1. Peningkatan kesadaran demokrasi. Peserta menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya hak pilih dan proses pemilu.
2. Partisipasi Aktif dalam Pemilu. Banyak pemilih pemula yang sebelumnya ragu untuk memilih, kini berkomitmen untuk menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2024.
3. Pengurangan Golongan Putih (Golput).
4. Melalui edukasi yang intensif, tingkat golput di kalangan pemilih pemula mengalami penurunan signifikan.
5. Peningkatan Kritis terhadap Politik Uang. Pemilih pemula lebih sadar akan bahaya politik uang dan berkomitmen untuk memilih berdasarkan kualitas calon, bukan iming-iming materi.

Meskipun program ini berhasil, ada beberapa tantangan yang dihadapi, yakni:

1. Kurangnya Sumber Daya. Terbatasnya dana dan tenaga pengabdian menjadi kendala dalam memperluas jangkauan program.
2. Akses Informasi yang Tidak Merata. Beberapa daerah di Kota Samarinda masih memiliki akses terbatas terhadap informasi digital, menyulitkan distribusi materi edukasi secara merata.
3. Apatitis Politik yang Masih Ada. Sebagian pemilih pemula masih menunjukkan sikap apatis terhadap politik, yang memerlukan pendekatan lebih lanjut untuk mengubahnya.

Untuk meningkatkan efektivitas program pendidikan politik bagi pemilih pemula PMKRI, ada beberapa hal yang direkomendasikan, yaitu:

1. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Pendidikan. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan institusi pendidikan untuk memperluas cakupan sosialisasi dan pelatihan.
2. Peningkatan Penggunaan Teknologi. Mengembangkan aplikasi atau platform digital yang menyediakan informasi pemilu secara interaktif dan mudah diakses.
3. Pendekatan Personal. Melakukan pendekatan personal melalui diskusi kelompok kecil atau mentoring untuk menggali dan mengatasi keraguan atau ketidakpahaman peserta.
4. Evaluasi dan Monitoring. Hal ini dilakukan dengan memantau jalannya program secara berkala untuk menilai sejauh mana dampak dan efektivitasnya. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian agar pelaksanaan program ke depannya menjadi lebih optimal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keseimpulan

Kegiatan tentang pendidikan politik untuk perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kota Samarinda telah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pemilu 2024. Melalui pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, diharapkan generasi muda dapat menjadi pemilih yang cerdas, kritis, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi. Serta berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam pendidikan politik dan pemberdayaan masyarakat, guna mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berkelanjutan.

2. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, adapun saran dari penulis yang sekiranya dapat disampaikan di dalam penulisan ini, yaitu adalah untuk selalu memberikan ruang dan kesempatan kepada pemilih pemula untuk dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum, karena ini dapat memberikan Pendidikan Politik pertama mahasiswa serta menjadi bagian dalam menentukan kepala daerah sesuai dengan hati nurani

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberi dukungan pada kegiatan pengabdian ini, terutama kepada seluruh peserta kegiatan terutama Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Samarinda, yang telah hadir dalam kegiatan ini. Semoga bermanfaat serta menjadi pengalaman pertama dalam Pemilu tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Arumsari, E. Y. L., & Nugraheni. 2018. *Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota Semarang Di Kota Semarang. Integralistik*, 396(2), 63–72.
- Asmuni. 2019. ISSN Cetak : 2656-4467 ISSN Online : 2656-8977 STIA Pembangunan Jember. *Majalah Ilmiah Pelita Ilmu*, 2(1), 15–25.
- Halim, Rahmawati & Lalongan Muhlim. 2016. *Partisipasi Politik Masyarakat : Teori dan Praktik*. Makassar : SAH MEDIA.
- Hidayat, S.(2021). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilu Tahun 2019 (Studi Kasus di Desa Lubuk Lancang Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan*. 2019, 1–53.
- Pamungkas, Iing, Heri Tri Irawan, Nissa Prasanti, Khairul Hadi, Abdiel Khaleil Akmal, and Risnadi Sentosa, Alfrid & Betty, K. 2022. *Perilaku Pemilih Pemula Dalam Pilkada*. Pekalongan : NEM.
- Sutisna, A. 2017. *Peningkatan Literasi Politik Pemilih Pemula Melalui Pendekatan Pembelajaran Kontekstual*, *Seminar Nasional Pendidikan*, 1–14

Dokumentasi Kegiatan

